

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta :  
Prenadamedia Group, hlm.264

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:  
Liberty, hlm. 103-104.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005).

Achmad Rifai, 2020, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum Pada Putusan  
Menciderai Keadilan Masyarakat*, Makassar : CV. Nas Media  
Pustaka

Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Penerbit  
Erlangga

\_\_\_\_\_R. Subekti, 2021, *Hukum Pembuktian*, Jakarta Timur : Balai Pustaka

\_\_\_\_\_Peter Mahmud Marzuki, 2019. *Penelitian Hukum*, Prenada Media  
Group, Jakarta.

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Kencana, Jakarta,

Albert Aries, 2022, *Hukum Pembuktian. Teori, Asas, dan Yurisprudensi dalam  
Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi*, Depok : PT  
RajaGrafindo Persada

\_\_\_\_\_Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press

Elisabethh Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*. Bandung : CV Nuansa Aulia.

Jimly Asshiddiqie, 2013, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Jakarta: Rajawali Pers.

Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing

John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts, Harvard University Press, 1995. hlm 528.

### **Jurnal-jurnal :**

Tatawu. 2017, *Hakikat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*, Volume 1 Issue 2, September 2017.hlm.14.6

Sudrajat. (2010). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada*. Jurnal Konstitusi. Vol 7. No. 4.

Nugraha. (2016). *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*. Jurnal Transformative. Vol 2. No 1.

Zoelva. (2013). *Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol 10. No. 3.

Safi. (2011). *Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11. No. 3.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.